



DINAS
PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Tahun 2022



IKHTISAR EKSEKUTI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di susun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. LAKIP digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dengan kegiatan yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung tahun 2019-2024. Sasaran strategis pada Renstra (Revisi) tersebut adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan; 2. Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan; 3. Meningkatnya nilai Perdagangan Luar Negeri; 4. Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting. Pada Tahun 2021 dilaksanakan revisi terhadap Renstra.

Hasil capaian kinerja menunjukkan keempat (4) sasaran strategis capaiannya sangat tinggi yaitu : 1. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan 91,40% 2. Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan 100%; 3. Meningkatnya nilai Perdagangan Luar Negeri 100%; 4. Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting 100%. Dari hasil pengukuran kinerja baik dalam pencapaian kinerja sasaran maupun kinerja keuangan, yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan tahun 2021 secara keseluruhan menunjukkan persentase yang cukup memuaskan, meskipun dirasakan masih dijumpai beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Namun dalam kondisi keterbatasan tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung telah berupaya secara maksimal mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, baik melalui kebijakan, program dan kegiatan yang dikelola pada tahun anggaran 2020.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja Tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dapat diselesaikan pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021. Dalam dokumen ini dimuat berbagai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang diwujudkan dalam bentuk pengukuran capaian kinerja output, kinerja program, dan kinerja sasaran.

Diharapkan dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung akan tergambar keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan program sebagai cerminan pencapaian sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun Anggaran 2021.

Bandar Lampung, Februari 2022

KEPALA DINAS,

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730524 199703 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis 2019-2024	7
A. Visi dan Misi	9
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator	9
C. Indikator Kinerja Utama	13
D. Perjanjian Kinerja Perubahan 2021	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	17
3.2 Capaian Tujuan dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2021 Sebelum Perubahan RPJMD Provinsi Lampung	19
3.3 Capaian Tujuan dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2021 Setelah Perubahan RPJMD Provinsi Lampung	20
3.4 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	21
3.5 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2021	53

3.6	Prestasi OPD yang diraih selama tahun 2021	55
3.7	Inovasi daerah	55
3.8	Tindak Lanjut Inspektorat	55
BAB IV	PENUTUP.....	56
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	3
Tabel 1.2 Aset yang dikuasai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	6
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sebelum Perubahan RPJMD Provinsi Lampung	11
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Setelah Perubahan RPJMD Provinsi Lampung	12
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Sebelum Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	13
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Setelah Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	14
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Sebelum perubahan RPJMD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2021	15
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Setelah perubahan RPJMD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2021	15
Tabel 2.7 Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 (APBD-P)..	16
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	18
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Sebelum Perubahan RPJMD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2021.....	20
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Setelah Perubahan RPJMD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2021.....	21
Tabel 3.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sebelum dan Sesudah Perubahan RPJMD.....	23

Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sebelum dan Sesudah Perubahan RPJMD Tahun 2021	24
Tabel 3.6	Pencapaian Target Misi Sebelum dan Sesudah Perubahan RPJMD ..	25
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran Sebelum dan Sesudah Perubahan RPJMD	26
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Sasaran Sesudah Perubahan RPJMD.....	27
Tabel 3.9	Data Ekspor Non Migas Provinsi Lampung Tahun 2018-2021	41
Tabel 3.10	Ekspor Berdasarkan Komoditi Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2020-2021	41
Tabel 3.11	Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Provinsi Lampung Tahun 2020-2021	42
Tabel 3.12	Perbandingan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi Lampung dengan Nilai Ekspor Non Migas Nasional	44
Tabel 3.13	Program dan Pagu Anggaran 2021.....	49
Tabel 3.14	Program dan Kegiatan Anggaran 2021.....	49
Tabel 3.15	Akuntabilitas Keuangan Tahun 2021 Sebelum Perubahan RPJMD Provinsi Lampung	52

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Rekapitulasi Data PNS Berdasarkan Golongan Ruang.....	4
Gambar 1.2 Data PNS berdasarkan pendidikan	4
Gambar 1.3 Data Pegawai Non PNS berdasarkan pendidikan	5



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung No. 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung bergabung menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri serta sarana dan prasarana industri;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan , pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri serta sarana dan prasarana industri;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerja sama , pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri serta sarana dan prasarana industri;
- d. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar di bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi kegiatan perdagangan;
- f. Pengembangan iklim dan kondisi pertumbuhan dan pemasyarakatan perdagangan;
- g. Penyediaan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor;
- h. Pembinaan dan pengendalian kemetrolagian skala provinsi;
- i. Pembinaan dan fasilitas tugas pembantuan dalam pengawasan pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung;
- j. Pembinaan dan penetapan serta kebijakan perlindungan Penumbuh kembangan iklim usaha perdagangan di Provinsi Lampung;

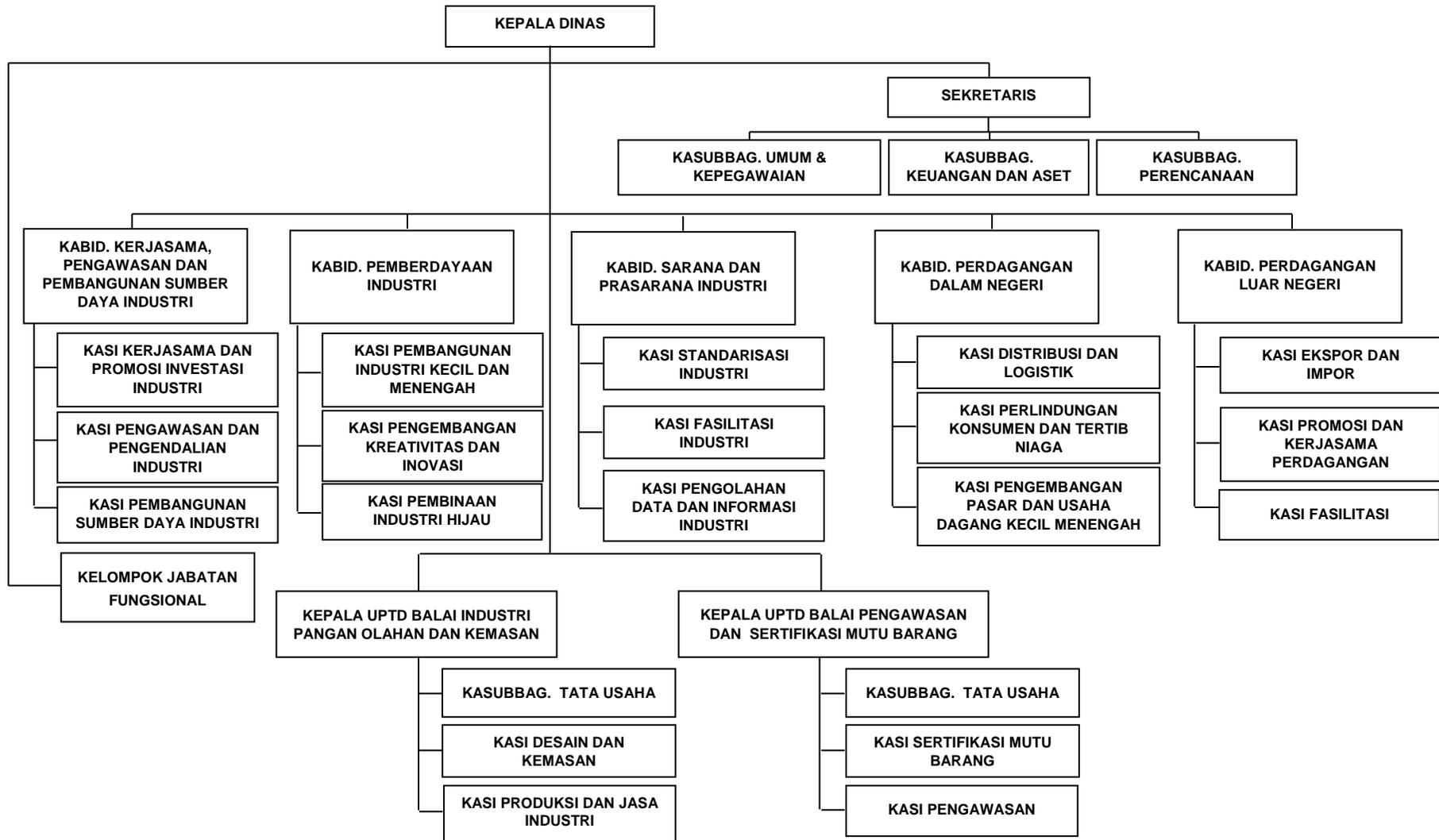


- k. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung dan lintas kabupaten/kota;
- l. Pelayanan administrasi; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung untuk melaksanakan serta menunjang tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut :

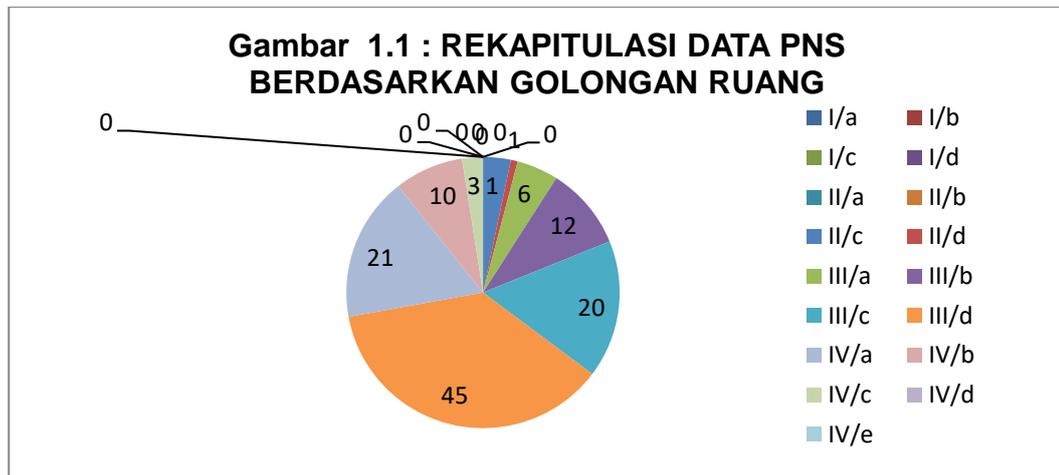


Tabel 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung





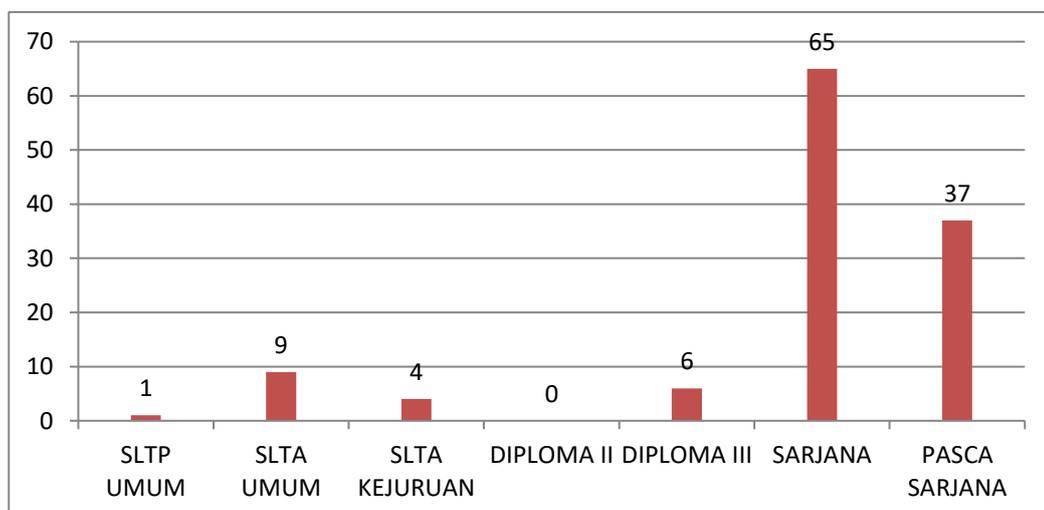
Sampai dengan Desember tahun 2021, Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Lampung memiliki 152 orang pegawai yang terdiri dari 122 Pegawai Negeri Sipil dan 30 orang Non Pegawai Negeri Sipil. Ketersediaan PNS dan Pegawai Non PNS berdasarkan kelompok golongan ruang dan tingkat pendidikan sebagai berikut :



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, sebaran golongan ruang PNS pada DINAS Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang terendah adalah golongan II/c, sedangkan golongan ruang yang tertinggi adalah golongan IV/c. Jumlah PNS dengan golongan III/d adalah golongan ruang terbanyak dengan jumlah sebanyak 45 orang, kemudian PNS dengan golongan ruang IV/c sebanyak 3 orang, sedangkan yang terendah II/c dengan jumlah sebanyak 4 orang.

Gambar 1.2 : Data PNS berdasarkan pendidikan

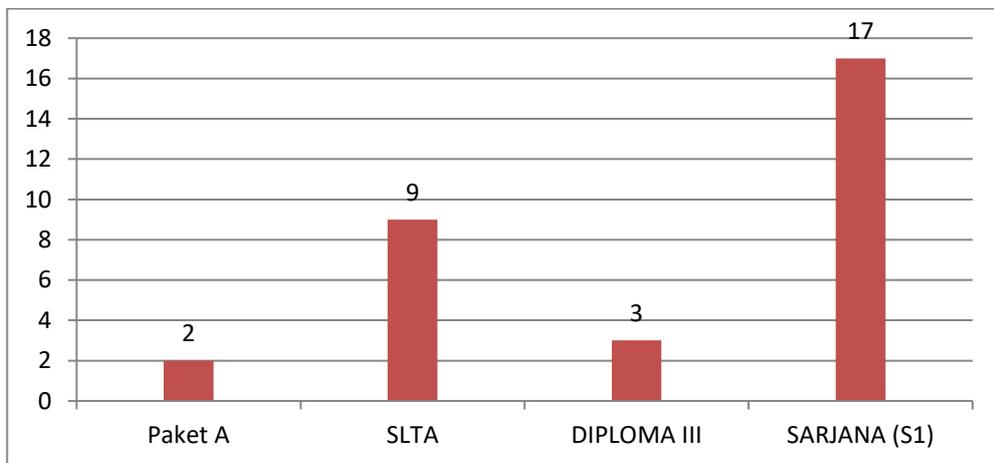


Sumber : Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Lampung



Berdasarkan gambar 2.2 diatas, tingkat pendidikan PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang terendah adalah SLTP dengan jumlah 1 orang, sedangkan tingkat pendidikan yang tertinggi adalah S2/Pasca Sarjana dengan jumlah sebanyak 37 orang. PNS dengan pendidikan sarjana adalah yang terbanyak dengan jumlah sebanyak 65 orang. Sedangkan ketersediaan pegawai non PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1.3 : Data Pegawai Non PNS berdasarkan pendidikan



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Berdasarkan gambar 2.3 diatas, rentang tingkat pendidikan pegawai non PNS di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung adalah dari Paket A dengan tingkat pendidikan yang terendah kemudian pendidikan Sarjana merupakan tingkat pendidikan tertinggi. Untuk pegawai non PNS dengan tingkat pendidikan Paket A berjumlah sebanyak 2 orang, tingkat pendidikan SLTA sebanyak 9 orang, tingkat pendidikan diploma sebanyak 3 orang dan tingkat pendidikan sarjana sebanyak 17 orang.

Dalam pengelolaan asset sampai dengan Desember 2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung memiliki jumlah asset sebagaimana tabel di halaman selanjutnya.



Tabel 1.2. Aset yang dikuasai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah Aset	Nilai Aset
1	Tanah	9	1.273.004.000
2	Peralatan dan Mesin	3.097	9.260.673.502
3	Gedung dan Bangunan	25	5.417.375.201
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12	1.178.525.010
5	Aset Tetap Lainnya	-	-
TOTAL		3.143	17.129.577.713

Sumber : Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung memiliki asset berupa tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jala, irigasi dan jaringan. Aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung berada di Kota Bandar Lampung, Pringsewu dan Lampung Selatan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENSTRA 2019 -2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 86 Tahun 2017 serta tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap perangkat daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD).

RENSTRA Perangkat Daerah merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menjelaskan lebih detail Rencana Pembangunan Suatu SKPD. RPJMD itu sendiri merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat Visi, Misi dan Program Presiden beserta arah kebijakan nasional. Penyusunan RPJMD Provinsi merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih dilantik pada tanggal 12 Juni 2019, sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD pada tahun 2018 lalu sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Provinsi Lampung serta



hasil konsultasi ke Menteri Dalam Negeri. Rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Hasil dari penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi masukan untuk perumusan Rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Hasil musrenbang RPJMD menjadi masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan Akhir RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD. Setelah disetujui, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Kemudian dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 akan menjadi dasar bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Renstra OPD Tahun 2019-2024, menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kab/Kota di Provinsi Lampung, serta menjadi Instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Pada tahun 2021 telah dilakukan revisi terhadap RPJMD Provinsi Lampung, begitu juga dengan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Rencana Strategis Perangkat Daerah harus memperhatikan semangat pembangunan, visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD serta sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Selain itu Rencana Strategis Perangkat Daerah juga harus memperhatikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN kemudian diturunkan pada RENSTRA K/L. Rencana Strategis juga harus memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Kemudian Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan Rencana Strategis perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah harus memiliki tujuan yang telah memuat sinergi yang baik antara arah kebijakan pusat dan arah kebijakan daerah, memiliki sasaran pembangunan yang telah sesuai dengan hasil analisis dari masing-masing bidang tugas, permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang



ada, serta kebijakan strategis dan telah mengakomodir komitmen serta kesepakatan dari semua stakeholder. Yang pada akhirnya meningkatkan efektifitas pembangunan di daerah khususnya pada sektor industri dan perdagangan.

A. VISI DAN MISI

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Provinsi Lampung yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 – 2024 adalah :

“Rakyat Lampung Berjaya”.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan tersebut, dengan tetap memperhatikan kondisinya permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. **Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.**
2. **Misi-2: Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.**
3. **Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.**
4. **Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.**
5. **Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.**
6. **Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.**

Berdasarkan penjabaran singkat tentang visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung tahun 2020 – 2024, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan **misi lima** yaitu : **Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.**

B. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas



pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Penetapan ini diharapkan membuat rencana pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan lima tahun kedepan dapat lebih fokus pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang cepat dalam pelaksanaan, tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Tujuan pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Lampung akan difokuskan pada : **“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi serta Menjaga Stabilitas Harga di Provinsi Lampung”**. Sasaran pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Lampung akan difokuskan pada 4 (empat) hal, yaitu:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan, adapun indikator sarasannya adalah Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%).
2. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan, adapun indikator sarasannya adalah Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%).
3. Meningkatkan nilai perdagangan Luar Negeri, dengan indikator sarasannya adalah Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$).
4. Menjaga Stabilitas harga bahan pangan pokok penting, dengan indikator sarasannya adalah Andil inflasi bahan makanan (%).

Ke- 4 (empat) sasaran berdasarkan Renstra Revisi tahun 2021, merupakan hasil asistensi dengan pihak-pihak terkait dan dipandang relevan serta sesuai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan, mengakomodir isu-isu strategis sektor perindustrian dan perdagangan, arah kebijakan nasional pada sektor perindustrian dan perdagangan, kemudian dengan tujuan serta sasaran jangka menengah kepala daerah Provinsi Lampung. Berikut kami sajikan sasaran strategis dengan targetnya pada tabel berikut ;



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sebelum Perubahan RPJMD Provinsi Lampung

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	20,15	20,5	20,85	21,2	21,56
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%)	2	Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB (%)	11,2	11,25	11,3	11,35	11,4
			3	Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	3,5	3,55	3,6	3,7	3,8
2	Menjaga Stabilitas harga	Laju Inflasi (%)	4	Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Penting	Andil inflasi bahan makanan (%)	0,10 – 0,50	0,10 – 0,51	0,10 – 0,52	0,10 – 0,54	0,10 – 0,55



Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Setelah Perubahan RPJMD Provinsi Lampung

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	1	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	-	5	5,8	6	6,3
			2	Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	-	5,3	6,3	6,8	7,2
			3	Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	-	3,3	3,48	3,65	3,8
2	Menjaga Stabilitas harga	Laju inflasi (%)	4	Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil inflasi bahan makanan (%)	-	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 2



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Sebelum Perubahan RPJMD Provinsi Lampung
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor Industri Pengolahan	Nilai PDRB sektor industri pengolahan dibagi total PDRB di kali 100 persen (ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku)	BPS Provinsi Lampung	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Lampung selama 1 tahun
2	Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	%	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor Perdagangan	Nilai PDRB sektor perdagangan dibagi total PDRB di kali 100 persen (ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku)	BPS Provinsi Lampung	Nilai PDRB Sektor Perdagangan Provinsi Lampung selama 1 tahun
3	Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	Nilai ekspor non migas	Miliar US\$	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah	Nilai ekspor non migas selama 1 tahun	BPS Provinsi Lampung	Nilai ekspor non migas Provinsi Lampung selama 1 tahun
4	Menjaga Stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil inflasi bahan makanan	%/tahun	Menjaga Agar Harga Pokok stabil agar tidak melambung tinggi	Rata-rata fluktuasi harga 19 bahan pangan pokok penting dalam satu tahun	Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Lampung	Hasil monitoring harga di 4 pasar Bandar Lampung dan 1 pasar di Kota Metro untuk 19 jenis bahan pangan pokok penting



Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Setelah Perubahan RPJMD Provinsi Lampung
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor Industri Pengolahan	Nilai PDRB sektor industri pengolahan dibagi total PDRB di kali 100 persen (ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku)	BPS Provinsi Lampung	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Lampung selama 1 tahun
2	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor Perdagangan	Nilai PDRB sektor perdagangan dibagi total PDRB di kali 100 persen (ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku)	BPS Provinsi Lampung	Nilai PDRB Sektor Perdagangan Provinsi Lampung selama 1 tahun
3	Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	Nilai ekspor non migas	Miliar US\$	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah	Nilai ekspor non migas selama 1 tahun	BPS Provinsi Lampung	Nilai ekspor non migas Provinsi Lampung selama 1 tahun
4	Menjaga Stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil inflasi bahan makanan	%/tahun	Menjaga Agar Harga Pokok stabil agar tidak melambung tinggi	Rata-rata fluktuasi harga 19 bahan pangan pokok penting dalam satu tahun	Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Lampung	Hasil monitoring harga di 4 pasar Bandar Lampung dan 1 pasar di Kota Metro untuk 19 jenis bahan pangan pokok penting





D. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2021

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas dengan Gubernur Lampung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Sebelum perubahan RPJMD
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	20,15
2	Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB	%	11,25
3	Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri	Nilai ekspor non migas	Miliar US\$	3,55
4	Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Penting	Andil Inflasi Bahan makanan	%	0,10 – 0,51

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Setelah perubahan RPJMD
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	5
2	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	5,3
3	Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri	Nilai ekspor non migas	Miliar US\$	3,33
4	Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Penting	Andil Inflasi Bahan Makanan	%	≤ 1,5



Tabel 2.7
Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 (APBD-P)

Program		Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	20.897.873.836
2.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp.	511.080.000
3.	Program Pengembangan Ekspor	Rp.	343.380.000
4.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp.	385.330.000
5.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.	93.795.000
6.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp.	7.916.027.001
7.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp.	178.569.000
8.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	50.000.000
TOTAL		Rp.	30.376.054.837



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2021 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan



jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Lampung

No	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA
1	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%
2	Tinggi	76% ≤ 90%
3	Sedang	66% ≤ 75%
4	Rendah	51% ≤ 65%
5	Sangat Rendah	≤ 50%

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian



dan Perdagangan Tahun 2021, hasil revidi dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 yang di tuangkan di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor 03/KP/V.26/Sekret.3/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

3.2 Capaian Tujuan dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2021 Sebelum Perubahan RPJMD Provinsi Lampung

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor 03/KP/V.26/Sekret.3/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Hasil pengukuran atas

indikator kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Sebelum Perubahan RPJMD
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
Tahun 2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Realisasi Tujuan	Capaian (%)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan	1 Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (nilai)	6,26	4,57	73,00	1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	20,5	19,65	95,85
		2 Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%)	8,2	8,26	100,73	2 Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	%	11,25	11,7	100
						3 Nilai Ekspor Non Migas	Miliar US\$	3,55	4,8	100
2	Menjaga Stabilitas Harga	1 Laju Inflasi (%)	3,0 - 3,5	2,19	100	4 Andil Inflasi bahan makanan	%	0,10 - 0,51	1,10	100

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Tingkat pencapaian tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sampai dengan Desember tahun 2021 telah tercapai ditunjukkan pada indikator tujuan sebagai berikut : 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dengan nilai target tujuan 6,26 dan Realisasi tujuan 4,57; 2. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dengan target tujuan 8,2% dan realisasi tujuan 8,26%; 3. Laju Inflasi dengan target tujuan 3.0% – 3.5% dan realisasi tujuan 2,19%.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **sangat tinggi**, ditunjukkan pada semua indikator kinerja utama.

3.3 Capaian Tujuan dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2021 Setelah Perubahan RPJMD Provinsi Lampung

Berdasarkan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan peraturan daerah nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung melakukan penyesuaian tujuan

dan sasaran strategis yang akan dicapai selama tahun 2021-2024. Rumusan perubahan tujuan, sasaran strategis beserta target yang akan dicapai, kami sajikan pada table berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Setelah Perubahan RPJMD
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Realisasi Tujuan	Capaian (%)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1 Laju pertumbuhan ekonomi (%)	2,5 - 3,5	2,79	100	1 Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	5	4,57	91,40
						2 Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	5,3	8,26	100
						3 Nilai Ekspor Non Migas	Miliar US\$	3,3	4,83	100
2	Menjaga Stabilitas harga	1 Laju Inflasi (%)	3 ± 1	2,19	100	4 Andil Inflasi bahan makanan	%	≤ 1,5	1,10	100

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Tingkat pencapaian tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sampai dengan Desember tahun 2021 tidak tercapai ditunjukkan pada indikator tujuan sebagai berikut : 1. Laju pertumbuhan ekonomi dengan persentase target tujuan 2,5-3,5 dan Realisasi tujuan 2,79; 2. Laju Inflasi dengan persentase tujuan 3 ± 1 dan realisasi tujuan 2,19%.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **sangat tinggi**, ditunjukkan pada semua indikator kinerja utama.

3.4. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan Strategis, Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan Misi. Penetapan ini diharapkan membuat rencana pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan lima tahun kedepan dapat lebih fokus pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang cepat dalam pelaksanaan, tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran.



Tujuan pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Lampung sebelum perubahan RPJMD akan difokuskan pada : “Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan serta Menjaga Stabilitas Harga di Provinsi Lampung” dengan Sasaran pembangunan difokuskan pada 4 (empat) hal, yaitu :

1. Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan, adapun indikator sasarannya adalah Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%).
2. Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan, adapun indikator sasarannya adalah Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Dalam PDRB (%).
3. Meningkatnya nilai perdagangan Luar Negeri, dengan indikator sasarannya adalah Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$).
4. Menjaga Stabilitas harga bahan pangan pokok penting, dengan indikator sasarannya adalah andil inflasi bahan makanan (%).

Sedangkan Tujuan pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Lampung setelah perubahan RPJMD akan difokuskan pada : “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi serta Menjaga Stabilitas Harga di Provinsi Lampung” dengan Sasaran pembangunan difokuskan pada 4 (empat) hal, yaitu :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan, adapun indikator sasarannya adalah Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%).
2. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan, adapun indikator sasarannya adalah Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%).
3. Meningkatnya nilai perdagangan Luar Negeri, dengan indikator sasarannya adalah Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)
4. Menjaga Stabilitas harga bahan pangan pokok penting, dengan indikator sasarannya adalah andil inflasi bahan makanan (%).

Ke- 4 (empat) sasaran diatas merupakan hasil asistensi dengan pihak – pihak terkait dan di pandang relevan serta sesuai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan, mengakomodir isu – isu strategis sektor perindustrian dan perdagangan, arah kebijakan nasional pada sektor perindustrian dan perdagangan, kemudian dengan tujuan serta sasaran jangka menengah kepala daerah Provinsi Lampung. Berikut kami sajikan sasaran strategis dengan targetnya pada tabel berikut:



Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sebelum dan Sesudah Perubahan RPJMD

NO.	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	2020		2021		2024	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	20,15	-	20,5	5	21,56	6,3
			Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%)		Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor perdagangan dalam PDRB (%)	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	11,2	-	11,25	5,3	11,4	7,2
					Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri	Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	3,5	-	3,55	3,3	3,7	3,8
2	Menjaga Stabilitas Harga	Menjaga Stabilitas Harga	Laju Inflasi (%)	Laju Inflasi (%)	Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Penting	Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Penting	Andil Inflasi bahan Makanan (%)	Andil Inflasi Bahan Makanan (%)	0,10 - 0,50	-	0,10 - 0,51	≤ 1,5	0,10 - 0,54	≤ 2

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Secara umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019 - 2024. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 sebanyak 4 sasaran. Tahun 2021 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, dari sebanyak 4 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:



Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sebelum dan Sesudah Perubahan RPJMD
Tahun 2021

NO.	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 2021					
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM			SESUDAH		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2		3		4			5		
1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	20,15	19,65	95,85	5	4,57	91,40
	Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor perdagangan dalam PDRB (%)	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	11,2	11,7	100	5,3	8,26	100
	Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri	Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	3,5	4,8	100	3,3	4,83	100
2	Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Penting	Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Penting	Andil Inflasi bahan Makanan (%)	Andil Inflasi Bahan Makanan (%)	0,10 - 0,50	1,10	100	≤ 1,5	1,10	100

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Dari sebanyak 4 Sasaran yang digambarkan pada tabel diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Pencapaian Target Misi
Sebelum dan Sesudah Perubahan RPJMD

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian									
			Indikator Sasaran I			Indikator Sasaran II		Indikator Sasaran III		Indikator Sasaran IV		
			Sangat Tinggi			Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		
			Jumlah	% Sebelum	% Sesudah	Jumlah	% Sebelum dan sesudah	Jumlah	% Sebelum dan sesudah	Jumlah	% Sebelum dan sesudah	
1	Misi 5	4	1	95,85	91,40	1	100	1	100	1	100	
	Jumlah	4	1	95,85	91,40	1	100	1	100	1	100	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung tahun 2019-2024 dengan tabel sebagai berikut:



Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran Sebelum dan Sesudah Perubahan RPJMD

NO.	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		TAHUN DASAR (2019)		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN														NASIONAL		
							2020						2021						2024				2021
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Realisasi Sebelum	Realisasi Sesudah	Sebelum			Sesudah			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Realisasi		
							Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian				Target	Capaian
1	2		3		4		5						6						7				8
1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	20,00	8,24	20,15	19,41	96,33	-	-	-	20,50	19,65	95,85	5	4,57	91,40	21,56	91,14	6,30	72,53	3,39
	Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor perdagangan dalam PDRB (%)	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	11,59	8,26	11,20	11,18	100	-	-	-	11,25	11,7	100	5,30	8,26	100	11,40	100	7,2	100	4,65
	Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri	Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	2,13	2,13	3,50	3,14	89,71	-	-	-	3,55	4,8	100	3,33	4,83	100	3,80	100	3,80	100	219,265
2	Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Penting	Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Penting	Andil Inflasi bahan Makanan (%)	Andil Inflasi Bahan Makanan (%)	0,30	0,30	0,10 - 0,50	1,15	56,52	-	-	-	0,10 - 0,50	1,10	100	≤ 1,5	1,10	100	0,10 - 0,55	100	≤ 2	100	0,41



Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran Sesudah Perubahan RPJMD

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2019			2020			2021			2024		Nasional 2021
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	-	8,26	-	-	-5,25	-	5	4,57	91,40	6,30	72,53	3,39
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	-	7,20	-	-	-6,64	-	5,30	8,26	100	7,2	100	4,65
Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	-	2,13	-	3,50	3,14	89,71	3,33	4,83	100	3,80	100	219,265
Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Penting	Andil Inflasi Bahan Makanan (%)	-	0,30	-	≤ 1,5	1,15	100	≤ 1,5	1,10	100	≤ 2	100	0,41

Berdasarkan tabel 3.8 di atas, maka analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung secara rinci adalah sebagai berikut:

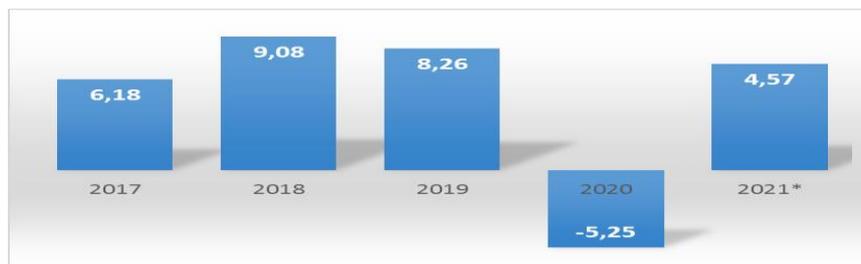
A. SASARAN 1

Sasaran 1	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
IKU	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)
Satuan	Persentase

2019			2020			2021			2024		Nasional 2021
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Realisasi
-	8,26	-	-	-5,25	-	5	4,57	91,40	6,30	72,53	3,39

Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dapat dilihat dari indikator 1 yaitu “Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan” adalah sebesar 4,57% dari target sebesar 5% yang di rencanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 91,40%, capaian ini telah sesuai dengan target yang diperjanjikan. Tahun 2021 adalah tahun pertama perubahan RPJMD, sehingga tidak memiliki perbandingan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan data nasional yaitu realisasi 2021 sebesar 3,39, Pertumbuhan Sektor Industri Lampung berada diatas capaian nasional, ini berarti Provinsi Lampung dapat menunjukkan pemulihan perekonomian dari efek pandemi COVID-19 dengan peningkatan pertumbuhan sektor industri yang terus membaik. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan masuk dalam kriteria penilaian realisasi **kinerja sangat tinggi**.

PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN



Pertumbuhan sektor industri pengolahan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan nilai 9,08%. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai -5,25%. Sampai dengan tahun 2021 pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar 4,57% (y on y)

➤ **Faktor Pendukung**

Disisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi tahun 2021 ditopang oleh tetap kuatnya kinerja sebagian LU di Provinsi Lampung. Pertumbuhan utama didorong oleh kinerja positif industri pengolahan. Pertumbuhan Industri Pengolahan didorong oleh peningkatan produksi industri makanan dan minuman serta industri briket di Lampung Selatan yang kembali berproduksi pada tahun 2021. Selain itu Pemerintah Provinsi Lampung terus berusaha dalam meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan yang telah didukung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung antara:

- a. Melakukan Transaksi Ekonomi di Provinsi Lampung dan mengupayakan melakukan transaksi menggunakan Bank Lampung.
- b. Meningkatkan Produksi barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di Provinsi Lampung.
- c. Meningkatkan Pendapatan masyarakat dengan terus mendorong kegiatan produksi, sehingga terus berkembang ke luar negeri dan mendapat keuntungan lebih.

➤ **Faktor Penghambat**

Walaupun capaian indikator Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan telah memenuhi target kinerja tahun 2021 yang telah ditetapkan, tetapi pada perjalanannya terdapat hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung selama tahun 2021 dalam mencapai sasaran strategis ini. Dari hasil evaluasi, beberapa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam mencapai sasaran startegis Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan adalah sebagai berikut :

Kinerja Lapangan usaha Industri Pengolahan pada tahun 2021 tercatat tumbuh positif sebesar 7,23% (yoy), meski melambat jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2021 yang tumbuh sebesar 8,13% (yoy). Kinerja Lapangan usaha industri pengolahan yang melambat juga terkonfirmasi dari penurunan realisasi impor bahan baku penolong makanan dan minuman (belum diolah) untuk industri sebesar 3,37% (yoy) pada triwulan III tahun 2021 dibandingkan dengan triwulan II tahun 2021 (85,43%; yoy), impor komoditas ini digunakan sebagai bahan baku produksi bahan makanan olahan dalam negeri untuk memenuhi permintaan pada periode selanjutnya.

Beberapa Faktor penghambat pada pencapaian peningkatan pertumbuhan sektor industri pengolahan yaitu:

- Masih terbatasnya kemampuan industri kecil dan menengah terutama dalam hal penerapan standar mutu, penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas, inovasi dan diversifikasi produk;
- Tidak tersedianya roadmap pembangunan SDM industri yang mengakibatkan belum tercapainya sinergi antara dunia pendidikan selaku *penyedia* dengan dunia industri selaku *user*;
- Hilirisasi pengolahan sumber daya alam belum optimal dilakukan di Provinsi Lampung, masih banyak sumber daya alam dari Provinsi Lampung yang dikirim keluar daerah dalam bentuk bahan mentah;
- Masih banyak potensi kerjasama antara industri kecil dan menengah (IKM) dengan perusahaan besar dan BUMN yang belum difasilitasi oleh pemerintah;

Untuk mengatasi kendala – kendala diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung memiliki solusi diantaranya :

- i. Meningkatkan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri;
- ii. Pengembangan sarana dan prasarana industri dan pengembangan sumber daya industri.

➤ **Kegiatan Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja**

Dalam menjalankan Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi target kinerja dari sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung selalu berusaha melibatkan dan menyentuh masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

– Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini didukung oleh kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dengan didukung oleh beberapa sub kegiatan prioritas sebagai berikut:

- i. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi, Sub kegiatan ini berupa penyusunan revisi RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi) Lampung dan reuiu RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten).

Revisi Rencana Pembangunan ini dibuat dengan melihat kondisi yang ada di masyarakat saat ini dan dengan melibatkan stakeholder terkait.

- ii. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, realisasi indikator kinerja program ini adalah 27 MoU dengan SMK se-Provinsi Lampung serta 5 MoU dengan Perusahaan Industri. Sub kegiatan ini bertujuan untuk terciptanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara industri dengan Lembaga Pendidikan Vokasi/SMK sehingga dapat bekerjasama secara terintegrasi, menyerap lulusan pendidikan kejuruan dan vokasi industri sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, serta dapat meningkatkan Industri di Provinsi Lampung, sehingga dapat meningkatkan pula Industri Pengolahan yang ada di Provinsi Lampung.



- iii. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Sub kegiatan ini pada pelaksanaannya didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan monitoring perencanaan persiapan Kawasan Industri di beberapa titik Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; Dokumen core industri pada kawasan industri Way Pisang, dimana potensi industri unggulan yang bisa dikembangkan di kawasan industri Way Pisang adalah berbasis agro. Berikut beberapa kegiatan dalam mendukung Sarana dan Prasarana Industri, Sentra IIKM serta Kawasan Industri LProvinsi Lampung.



Kegiatan dukungan pada promosi produk IKM yaitu kurasi produk IKM, kegiatan kurasi ini diikuti 32 peserta IKM dari Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Timur dan dari hasil kurasi terdapat 11 produk unggulan. Kegiatan kurasi ini, tidak hanya sekedar menyeleksi dan memilih produk yang siap memasuki pasar global, tetapi Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong pelaku IKM memproduksi produk yang dibutuhkan oleh pasar.

- c. Memberikan Bantuan peralatan bagi IKM yang terdiri dari Peralatan untuk roasting kopi; Peralatan pengolahan lada berupa alat pengukur kadar air, oven lada, alat sortasi; Alat spinr/pengering minyak untuk makanan ringan, mesin oven, vacum dan mixer; Alat untuk batik lampung berupa bak pencelupan batik; Peralatan di sampaikan kepada IKM secara langsung ke lokasi produksi dan juga diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Lampung pada Acara Kunjungan kerja Gubernur Lampung di Kabupaten Way Kanan pada tanggal 15 November 2021.



- d. Penyuluhan keamanan pangan diikuti oleh 50 IKM di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran. Kegiatan ini bertujuan agar IKM memahami akan penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP), yang pada akhirnya setelah paham IKM dapat menerapkannya pada proses produksinya. Diharapkan nantinya IKM dapat mengurus dan mendapatkan sertifikat PIRT bagi produk pangan IKM, serta dapat berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan industri pengolahan.



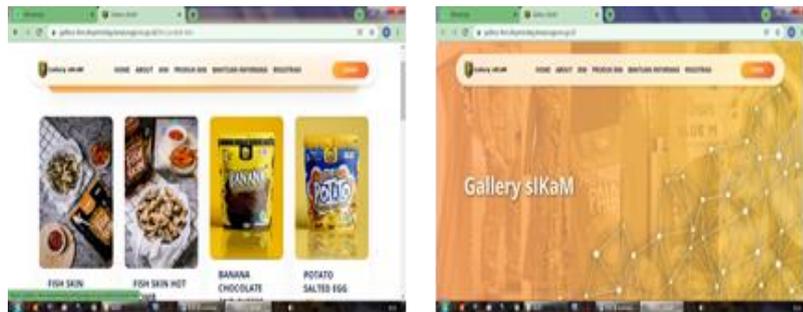
- e. Fasilitasi bantuan pembiayaan Sertifikasi Halal bagi 30 IKM dan Serifikat Izin Edar (MD) terhadap produk olahan pangan BPOM RI sebanyak 3 IKM.



- f. Kegiatan Sosialisasi SNI merupakan pelatihan sistem manajemen mutu ISO 9001. Kegiatan ini dengan tujuan dan manfaat penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 pada perusahaan, diantaranya Untuk mengatur sistem administrasi dan dokumen, mengelola resiko yang dapat muncul, melakukan control terhadap top manajemen agar lebih focus dan konsisten dalam mencapai sasaran mutu dalam perusahaan atau organisasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13-15 Oktober 2021 di Hotel Kunia 2 dengan jumlah peserta 30 orang UMKM/IKM.
- g. Pemahaman Hazard Analisis and Critical Control Point (HACCP), dilaksanakan pada tanggal 10-12 Oktober 2021 di Hotel Kurnia 2 dengan jumlah peserta 25 orang. Tujuan dari pemahaman HACCP kepada pelaku UMKM/IKM di provinsi Lampung adalah sebagai berikut para peserta memahami HACCP sebagai alat pengukur/pengendali jaminan keamanan pangan atas bahaya (hazard) yang berasal dari mikrobiologi; Memperkecil kemungkinan adanya kontaminasi mikroba patogen; Peserta mempunyai konsep rencana

penerapan HACCP yang disesuaikan dengan proses produksi ataupun distribusinya; dan Peserta dapat memahami tingkat risiko kesehatan atas produk yang dihasilkan.

- h. Membangun sarana dan prasarana digital bagi IKM dalam memasarkan dan mempromosikan produk melalui Aplikasi Gallery sIKaM berbasis web. Gallery sIKaM adalah platform digital berbasis website yang menampilkan produk IKM di Provinsi Lampung yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh siapa pun. Dengan tampilan yang mudah digunakan, Gallery sIKaM memiliki misi untuk memperluas publikasi dan meningkatkan pemasaran Produk IKM, serta sebagai Database jumlah dan jenis Produk IKM di Provinsi Lampung agar dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia secara luas. aplikasinya sudah dapat diakses pada : <https://gallery-ikm.disperindag.lampungprov.go.id/>



- iv. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Berikut beberapa pelaksanaan sub kegiatan pendukung kegiatan antara lain Bimtek Diversifikasi Produk IKM kerajinan tapis bagi IKM, Bimtek Diversifikasi pengolahan makanan jajan pasar berbahan baku lokal bagi IKM; Bimtek Diversifikasi Produk Lada Bagi IKM dan Kelompok Tani; Bimtek Diversifikasi Kerajinan Batik Lampung Bagi IKM; Bimtek diversifikasi olahan ikan bagi IKM; Kegiatan FGD kampung tapis Provinsi Lampung, dan Rapat Koordinasi penentuan lokasi Desa Wisata Kampung Tapis; Sosialisasi Penerapan Prinsip Industri Hijau dan kegiatan Pendampingan khusus Penerapan Prinsip Industri Hijau; Kegiatan pelatihan Gugus kendali mutu (GKM) yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan dengan 35 IKM pangan dan Kab. Pesawaran kepada 35 IKM Pangan.

Kegiatan penyusunan Data Potensi IKM secara umum dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi untuk mendapatkan dokumen data serta melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap industri kecil yang potensial bisa ditawarkan kepada industri besar dalam rangka pengembangan usaha melalui pola kemitraan usaha; Temu Kemitraan IKM dengan Industri besar dan BUMN diikuti 40 orang peserta IKM. Fasilitas ini dilaksanakan dengan tema “Sinergitas IKM, Industri, BUMN dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pengembangan IKM”;

Peringatan International Coffee Day yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 secara Hybrid di lapangan Garuda Hitam Enggal Bandar Lampung, yang diikuti oleh Pelaku usaha, eksportir, IKM/UKM Kopi dari kab/kota se provinsi Lampung. Acara ini bertujuan sebagai sarana promosi produk kopi Robusta Lampung beserta produk turunannya dan menjadi media eksistensi dari petani, IKM, UKM dan pelaku usaha Kopi di Provinsi Lampung;

Apresiasi penghargaan bagi IKM berprestasi, inovatif dan IKM ekspor perdana; dan Kegiatan yang dilaksanakan mendukung UPTD BIPOK (Balai Industri Panagn Olahan dan Kemasan) berupa pelayanan rumah kemasan yaitu pelayanan desain kemasan dan cetak kemasan bagi IKM kab/kota se Provinsi Lampung dan pelaksanaan Workshop Industri logam kepada masyarakat.

– Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi. Kegiatan ini didukung oleh beberapa sub kegiatan prioritas sebagai berikut Fasilitas Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sisten Pelayanan Perizinan; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi.

- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Kegiatan berupa penyusunan data IKM Lampung tahun 2020-2021 dimana dalam Buku data ini terdapat data IKM pada Sentra per Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Data IKM per kabupaten/Kota. Pembuatan Buku Lampung Industri Estate tahun 2021 yang merupakan buku profil yang menjabarkan secara umum lima kawasan industri yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Dalam buku ini juga dipaparkan bentuk potensi dan infrastruktur daerah kawasan industri-industri tersebut.

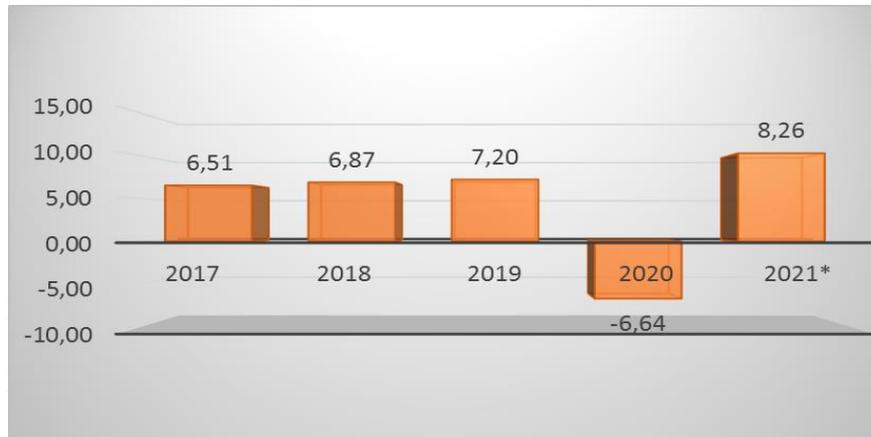
B. SASARAN 2

Sasaran 2	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan
IKU	Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)
Satuan	Persentase

2019			2020			2021			2024		Nasional 2021
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Realisasi
-	7,20	-	-	-6,64	-	5,30	8,26	100	7,2	100	4,65

Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan dapat dilihat dari indikator yaitu “Pertumbuhan Sektor Perdagangan” dengan capaian kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 8,26% dari target sebesar 5,30% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2021 adalah tahun pertama perubahan sehingga tidak ada pembandingan dengan tahun sebelumnya. Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan masuk dalam kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi.

PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN



Pertumbuhan sektor perdagangan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 7,20%. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai -5,93%. Tahun 2021 nilai pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 8,26% (y on y).

➤ **Faktor Pendukung**

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 ditopang oleh tetap kuatnya kinerja sebagian besar lapangan usaha di Provinsi Lampung. Adapun pertumbuhan tersebut selain di topang oleh Industri Pengolahan, juga ditopang oleh sektor perdagangan dengan pertumbuhan 8,26% (yoy). Pertumbuhan pada Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor didorong oleh masih positifnya penjualan kendaraan bermotor seiring dengan berlanjutnya relaksasi PPnBM kendaraan bermotor s.d Desember 2021.

➤ **Faktor Penghambat**

Melambatnya pertumbuhan Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor ini sejalan dengan kinerja konsumsi rumah tangga Provinsi Lampung yang juga tercatat melambat yang di pengaruhi oleh terbatasnya mobilitas masyarakat akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Perlambatan yang terjadi pada kinerja perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tercemin dari beberapa indikator. Penyaluran kredit LU perdagangan besar dan eceran pada 2021 tumbuh. Sejalan dengan hal tersebut,

hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia menunjukkan penurunan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) jumlah tenaga kerja LU perdagangan dari 0,82% pada triwulan II 2021 menjadi sebesar -0,33% pada triwulan III. Selain itu, penyaluran kredit mobil mengalami kontraksi sebesar -18,72% (yoy) pada triwulan III 2021 ditengah penurunan penjualan kendaraan mobil, truk, dan bus.

Untuk mengatasi kendala – kendala diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung memiliki solusi diantaranya :

- i. Meningkatkan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi pada Lapangan Usaha Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor.
- ii. Pengembangan sarana dan prasarana Lapangan Usaha Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor. dan pengembangan sumber daya Lapangan Usaha Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor.

➤ **Kegiatan Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja**

Program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian realisasi target kinerja dari sasaran strategis II yaitu persentase pertumbuhan sektor perdagangan yang langsung menyentuh masyarakat berupa:

- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan:

- Melakukan Kegiatan Bazar Rebo Kegiatan bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku UKM/IKM agar berorientasi yang tinggi sehingga mampu meningkatkan daya saing, pendapatan dan produktivitas usaha.
- Bazar Rebo mulai diinisiasi untuk dilaksanakan di Kabupaten, pelaksanaan perdana di Kabupaten Way Kanan bersamaan dengan Acara Kunjungan Kerja Gubernur.
- Sosialisasi Fasilitasi Merek dagang dan Sertifikasi halal bagi para pelaku usaha/UMKM yang terdiri dari 7 UKM yang difasilitasi pendaftaran merk dagang dan 8 UKM yang di fasilitasi sertifikat halal.

- Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di seluruh Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan prioritas sebagai Kegiatan ini berupa pemilihan Duta Konsumen Cerdas dan diikuti oleh 89 peserta setelah melalui seleksi dan uji pengetahuan terkait Perlindungan Konsumen di dapatkan 3 orang pemenang; dan Sosialisasi pembentukan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang akan dibentuk pada Kabupaten/Kota. Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pengambilan sample produk di Gudang Pelaku Usaha yang akan melaksanakan sertifikasi komoditi barang ekspor sesuai dengan pengajuan dari pelaku usaha. Pelaksanaan pengujian mutu komoditi dilaksanakan setiap hari di Lab UPTD BPSMB, yang bertujuan meningkatkan pengujian mutu barang yang sesuai dengan standar ISO 17025:2017; dan Pengembangan Layanan Sertifikasi dengan tujuan agar terlaksananya survey kepuasan pelanggan, terlaksananya kegiatan audit internal, terlaksananya uji banding antar laboratorium.
- Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa diseluruh Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan prioritas sebagai berikut Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen Pengawasan Barang beredar dan barang ber SNI dilaksanakan sebanyak 11 kali di 11 kabupaten/Kota pada 6 jenis barang yang terdiri dari kabel listrik, tusuk kontak, kontak kontak, lampu hemat energi, produk selang karet untuk kompor gas LPG dan produk regulator tekanan rendah. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak ditemukan pelanggaran, semua produk yang diperdagangkannya sudah berstandar SNI.

C. SASARAN 3

Sasaran 3	Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri
IKU	Nilai Ekspor Non Migas
Satuan	Miliar US\$

2019			2020			2021			2024		Nasional 2021
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Realisasi
-	2,13	-	3,50	3,14	89,71	3,33	4,83	100	3,80	100	219,265

Sasaran Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri dapat dilihat dari indikator yaitu “Nilai Ekspor Non Migas” dengan capaian kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 4,83 miliar US\$ dari target sebesar 3,33 miliar US\$ yang di rencanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerja adalah 100%. Capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2021 adalah tahun pertama perubahan sehingga tidak ada pembandingan dengan tahun sebelumnya. Nilai Ekspor Non Migas masuk dalam kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi.

➤ Faktor Pendukung

Di samping itu, secara seasonal terdapat kemungkinan kenaikan volume impor barang konsumsi menjelang Natal dan Liburan akhir tahun seiring dengan peningkatan permintaan sehingga berpengaruh pada pelemahan net ekspor. Pemulihan ekonomi Negara mitra dagang utama Provinsi Lampung meningkatkan permintaan ekspor untuk industri pengolahan makanan cukup signifikan dari Amerika, Eropa, Asia Timur dan Arab Saudi. Selain itu, untuk mendukung proses pemulihan ekonomi, Pemerintah Pusat memberikan dukungan kepada dunia usaha melalui percepatan proses perizinan ekspor dan impor serta peningkatan layanan melalui *National Logistic Ecosystem*.

Berikut kami sajikan data ekspor non migas Provinsi Lampung hingga akhir tahun 2021 beserta perbandingan dengan nilai ekspor non migas tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Data Ekspor Non Migas Provinsi Lampung
Tahun 2018-2021

No	Ekspor	2018 (Juta US\$)	2019 (Juta US\$)	2020 (Juta US\$)	2021 (Juta US\$)
1	Non Migas	3,437.4	2,929.2	3,144.7	4,837.1

Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)

Berdasarkan tabel 3.10, nilai ekspor non migas sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar 4,837.1 Juta US\$. Nilai ini mengalami kenaikan, ekspor terendah terjadi pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 2,929.2 juta US\$. Dari Tabel 3.10 di atas, terlihat bahwa nilai ekspor Provinsi Lampung bergerak secara fluktuatif dari tahun 2018-2021.

Tabel 3.10
Ekspor Berdasarkan Komoditi Unggulan Provinsi Lampung
Tahun 2020-2021

NO	KOMODITI UNGGULAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021
		Nilai (dalam juta \$)	Nilai (dalam juta \$)
1	MINYAK SAWIT/CPO	1.057	1.668,9
2	KOPI ROBUSTA	367,0	393,7
3	NANAS/TURUNAN	283,1	350,9
4	UDANG BEKU/OLAHAN	213,3	242,9
5	PULP	170,9	206,5
6	KARET SIR 20	108,5	121,0
7	LADA HITAM	56,2	44,2
8	MOLASSES	55,0	78,0
9	KELAPA KERING /SEGAR	5,8	4,6
10	BIJI KAKAO	0,1	0
LAINNYA		828,0	1.726
TOTAL EKSPOR		3.144,8	4.837,1

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Kinerja sektor eksternal tercatat positif, didorong oleh pertumbuhan net ekspor yang lebih tinggi pada 2021 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2021, ekspor tercatat meningkat jika dibandingkan dengan

tahun sebelumnya (54% yoy) seiring pemulihan kondisi perekonomian mitra dagang utama Lampung, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok.

Peningkatan kinerja ekspor luar negeri di Provinsi Lampung bersumber dari peningkatan volume ekspor bahan bakar mineral; lemak dan minyak hewan/nabati; dan olahan dari buah-buahan/sayuran. Ekspor komoditas bahan bakar mineral meningkat pada tahun 2021. Kondisi ini terutama di dorong oleh meningkatnya permintaan ekspor batu bara seiring pemulihan ekonomi di beberapa Negara mitra dagang utama, serta peningkatan harga batu-bara Internasional.

Disamping itu, perkembangan harga CPO, Lada dan kopi juga mengalami peningkatan. Peningkatan harga CPO Internasional mendorong kinerja ekspor lemak dan minyak hewan/nabati meningkat tajam dari sebesar pada tahun 2021. Sementara itu, kinerja ekspor olahan dari buah-buahan/sayuran tumbuh tahun 2021.

Apabila dilihat pada Tabel 3.11 Pada Tahun 2021, ekspor komoditi unggulan Provinsi Lampung sebesar 4.837,1 juta\$. Nilai ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan 2020, dimana nilai ekspor unggulan sebesar 3.144,8 juta\$. Minyak Sawit/CPO merupakan komoditi yang memiliki kontribusi terbesar pada komposisi ekspor non migas pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 1.668,9 juta\$ atau sekitar 34,50% dari total nilai ekspor Provinsi Lampung. Nilai ini mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 1.057 juta\$. Molasses merupakan komoditi yang mengalami penurunan nilai ekspor tertinggi pada tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 23,1 juta\$.

Tabel 3.11
Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Provinsi Lampung
Tahun 2020-2021

NO	NEGARA TUJUAN	2020	2021
		Nilai (\$)	Nilai (\$)
1	UNITED STATES	504.256.653,3	832.454.731,3
2	CHINA	327.631.379,9	925.265.460,0
3	PAKISTAN	253.031.187,9	359.915.792,3
4	INDIA	305.432.884,2	144.958.070,6
5	JAPAN	116.840.407,5	194.700.192,5

NO	NEGARA TUJUAN	2020	2021
		Nilai (\$)	Nilai (\$)
6	KOREA	77.369.558,3	139.545.564,8
7	NETHERLANDS	186.505.764,9	283.186.683,2
8	ITALY	249.771.830,5	414.018.940,2
9	PHILIPPINES	94.409.418,5	248.345.512,2
10	ASEAN LAINNYA	220.926.186,2	274.610.345,9
LAINNYA		808.586.601	1.020.089.122
TOTAL EKSPOR		3.144.761.872,4	4.837.090.415

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Pada Tahun 2021 CHINA merupakan negara tujuan ekspor yang menyumbang nilai ekspor terbesar dengan nilai sebesar 925.265.460,0 \$ atau sekitar 19,12% dari total nilai ekspor Provinsi Lampung. Nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020, dimana nilai ekspor ke CHINA pada tahun 2020 sebesar 327.631.379,9 \$. Kemudian diikuti oleh negara UNITED STATES di tempat kedua sebagai negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai 832.454.731,3 \$ atau sebesar 17,20% dari total nilai ekspor Provinsi Lampung. Nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020, dimana ekspor ke UNITED STATES pada tahun 2020 sebesar 504.256.653,3.

Tambahan informasi bersumber dari Bank Indonesia komposisi komoditi ekspor, pangsa terbesar ekspor Lampung tidak banyak mengalami perubahan dari triwulan sebelumnya, yakni berasal dari ekspor lemak dan minyak hewan/nabati (CPO). Ekspor lemak dan minyak hewan/nabati memiliki pangsa sebesar 36,64% dari total ekspor pada triwulan III 2021, diikuti oleh komoditas bahan bakar mineral (19,46%). Sementara itu, negara tujuan ekspor terbesar Provinsi Lampung pada triwulan III 2021 adalah Tiongkok (19%), Amerika Serikat (15%), dan Italia (10%).

Tren kenaikan nilai ekspor non migas yang terjadi di tingkat nasional terlihat juga di Provinsi Lampung, walaupun kenaikan nilai ekspor non migas tidak signifikan di tingkat Nasional yaitu 0,53%. Berikut kami sajikan perbandingan ekspor non migas Provinsi Lampung dengan nilai ekspor non migas nasional sebagai berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi Lampung
Dengan Nilai Ekspor Non Migas Nasional

No	Keterangan	Tahun		Perubahan
		2021	2020	
1	Nasional	219,246.9 Juta US\$	154,940.8 Juta US\$	41,50 %
2	Provinsi Lampung	4,837.1 Juta US\$	3,144.7 Juta US\$	53,84 %

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) diolah

Dari tabel 3.13 diatas terlihat bahwa nilai ekspor di tingkat nasional mengalami kenaikan sebesar 41,50%, dari 154,940.8 juta US\$ pada tahun 2020 naik menjadi 219,246.9 juta US\$ pada tahun 2021. Kondisi ini sama dengan kinerja ekspor Provinsi Lampung dimana nilai ekspor non migas Provinsi Lampung naik sebesar 53,84%, dari 3,144.7 juta US\$ menjadi 4,837.1 Juta US\$._Tahun 2021 adalah tahun kedua renstra, capaian kinerja indikator 3 "Nilai Ekspor Non Migas" tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 89,71%.

➤ **Faktor Penghambat**

Faktor penghambat Ekspor adalah :

- Masih rendahnya informasi serta perkembangan pasar pada negara tujuan ekspor yang diperoleh para eksportir di dalam daerah.
- Masih dominannya komoditas-komoditas unggulan yang berkontribusi pada nilai ekspor Provinsi Lampung.
- Masih kurangnya sinergitas dan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam upaya peningkatan ekspor Provinsi Lampung.

Solusi yang dilakukan dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung adalah :

- a. Meningkatkan pengetahuan eksportir, kerjasama, dan pengawasan terhadap eksportir.
- b. Mengembangkan sarana dan prasarana eksportir.
- c. Mendorong IKM agar dapat mengekspor produknya guna perluasan pasar produknya.

Kegiatan Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Salah satu tupoksi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah pelaksanaan tugas di bidang perdagangan luar negeri. Sasaran kinerja ini berkaitan dengan upaya meningkatnya nilai perdagangan luar negeri dengan indikator kinerja dari sasaran strategis adalah nilai ekspor non migas. Sasaran ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kinerja ekspor serta meningkatkan kualitas barang ekspor agar dapat bersaing di pasar Internasional agar berkontribusi lebih besar bagi perekonomian Provinsi Lampung.

Target kinerja dalam nilai ekspor non migas senilai 3,33 US\$ dan pencapaian realisasi kinerja sebesar 4,83 US\$. Hasil ini menunjukkan bahwa progres capaian dari indikator pada tahun 2021 adalah 100%, ini menunjukkan bahwa nilai ekspor non migas telah melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Penyebab terjadinya nilai ekspor dari target dikarenakan banyaknya permintaan komoditi dari beberapa negara tujuan ekspor Provinsi Lampung usai masa pandemi Covid-19.

Adapun program yang menyentuh masyarakat secara langsung adalah Program Pengembangan Ekspor dengan melakukan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui:

- Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- Peningkatan Citra Produk Ekspor. Pelaksanaan sub kegiatan ini berupa pengiriman sample produk IKM potensial ekspor ke Luar Negeri melalui ITPC dan Atase Perdagangan di 5 Negara yaitu India, Brazil, Abu Dhabi, Turki dan Korea Selatan. Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana promosi produk Lampung ke Luar Negeri sehingga diharapkan nantinya akan ada permintaan dari buyer luar negeri akan produk-produk tersebut. Produk yang dikirimkan adalah sample produk beserta Katalog Produk dari 14 IKM yang terdiri dari produk Keripik Pisang, Madu Hutan, Madu Propolis, Kopi Bubuk, Lada, Keripik Kentang, Keripik Talas, Fish Skin, Bumbu dapur kemasan, Kelapa Utuh, Kelapa oven, Cocopeat, gula semut serta Produk Kerajinan berupa Handbag Motif tapis dan Hiasan dinding.
- Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor. Kegiatan ini mempunyai tujuan agar pelaku usaha yaitu IKM mampu menjalankan bisnis secara efektif dan berpotensi menjadi eksportir baru. Pembinaan dilaksanakan melalui Coaching ekspor

program yang bekerjasama dengan Ditjen PEN Kementerian Perdagangan RI. Pembinaan dilaksanakan selama satu tahun pendampingan melalui 8 tahapan pelatihan kepada 30 IKM yang dinilai produknya berpotensi untuk ekspor ke Luar Negeri. Setelah dibina terdapat 7 IKM yang berhasil ekspor produknya walaupun ada yang masih skala kecil.

D. SASARAN 4

Sasaran 1	Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting
IKU	Andil Inflasi bahan makanan (%)
Satuan	Persentase

2019			2020			2021			2024		Nasional 2021
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Realisasi
-	0,30	-	\leq 1,5	1,15	100	\leq 1,5	1,10	100	\leq 2	100	0,41

Sasaran “Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting” dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu “Andil inflasi Bahan Makanan” adalah sebesar 1,10% dari target sebesar kisaran \leq 1,5 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2021 adalah tahun pertama perubahan sehingga tidak ada pembandingan dengan tahun sebelumnya. Andil inflasi Bahan Makanan" masuk dalam kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi.

➤ Faktor Pendukung

Kelompok makanan, minuman dan tembakau terpantau mengalami penurunan tekanan inflasi yaitu sebesar 3,81% (yoy) di triwulan III 2021, lebih rendah dibandingkan triwulan II 4,2% (yoy). Disisi lain, tekanan inflasi pada sub kelompok makanan masih tertahan oleh beberapa komoditas yang mengalami deflasi seperti komoditas beras, telur ayam ras dan petai dengan andil inflasi masing-masing sebesar (-0,18%), (-0,10%), dan (-0,07%). Penurunan harga komoditas beras didorong oleh terjaganya pasokan memasuki masa panen di beberapa sentra produksi, disisi lain penurunan harga yang terjadi pada kelompok telur ayam ras bersumber dari pasokannya yang cukup melimpah, di tengah terbatasnya proses pemulihan permintaan terutama untuk sektor horeca (hotel, restoran, café) yang

merupakan penyumbang konsumsi terbesar telur ayam ras. Pada sub kelompok tembakau, pada periode triwulan III 2021 menyumbang inflasi dengan andil sebesar 0,34%. Adapun peningkatan tekanan inflasi pada sub kelompok ini didorong oleh peningkatan harga dari distributor seiring dengan tariff dasar cukai sebesar 12,5% di awal tahun 2021.

➤ **Faktor Penghambat**

Pada triwulan III 2021, kelompok makanan, minuman dan tembakau merupakan kelompok penyumbang inflasi dengan andil terbesar yaitu 1,08% (yoy). Dari kelompok makanan, minuman dan tembakau, sub kelompok makanan merupakan penyumbang inflasi dengan andil sebesar (0,73%). Komoditas utama yang menyumbang tekanan inflasi pada sub kelompok tersebut antara lain minyak goreng (0,24%), tempe (0,14%) dan ikan kembung (0,12%). Peningkatan inflasi pada komoditas minyak goreng disebabkan oleh masih berlanjutnya peningkatan harga komoditas CPO dunia sebagai bahan baku utama. Selain itu, harga tempe juga naik dipengaruhi oleh meningkatnya bahan baku kedelai. Lebih lanjutnya, peningkatan harga ikan kembung disebabkan oleh terbatasnya produksi ikan, karena faktor curah hujan yang relatif tinggi dan menyebabkan keterbatasan nelayan untuk melaut.

➤ **Kegiatan Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini berkaitan dengan upaya menjaga stabilitasi harga bahan pangan pokok penting untuk melihat laju perubahan harga rata-rata bahan pangan pokok di pasaran, komoditi yang dominan memberikan andil dalam pembentukan inflasi bahan makanan diantaranya bawang putih, bawang merah, cabe merah dan gula. Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah andil inflasi bahan makanan. Realisasi sasaran strategisnya senilai < 1,5 sedangkan target andil inflasi berkisar 1,1. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja andil inflasi pada tahun 2021 masih sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Penyebab terjadinya lonjakan harga bahan makanan pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung memberi andil pada inflasi Provinsi Lampung.

Program yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang langsung menyentuh masyarakat adalah sebagai berikut:

- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan melakukan pengendalian harga informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan. Sub kegiatan diuraikan sebagai berikut :
 - Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota. Kegiatan ini berupa pemantauan harga Bahan Pokok pada 36 jenis Komoditi yang dipantau setiap hari kerja pada 6 pasar di Bandar Lampung yaitu pasar Pasir Gintung, Pasar Kangkung, Pasar Way Halim, Pasar Panjang, Pasar Tamin dan Pasar Cimeng. Hasil pemantauan harga tersebut dilaporkan ke Kementerian Perdagangan dan juga diinput pada aplikasi SIGAP LAMPUNG, sehingga aparat, stakeholder dan seluruh masyarakat dapat mengetahui perkembangan harga komoditi tersebut. Apabila terjadi gejolak harga maka pemerintah dapat mengambil kebijakan yang diperlukan seperti Operasi pasar atau penetrasi pasar.
 - Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 Daerah Provinsi. Berikut beberapa kegiatan pendukung sub kegiatan operasi pasar dalam rangka stabilitasi harga pangan pokok, diantaranya :
 - Kegiatan Pasar Murah Bersubsidi yang mempunyai tujuan agar masyarakat yang rentan ekonomi berpenghasilan rendah dapat memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan pokok dengan harga yang murah/terjangkau (lebih rendah dari harga di pasaran) dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yaitu bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 M. Kegiatan ini dilakukan pada 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

3.5 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA 2021

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada tahun 2021 memiliki pagu anggaran berdasarkan APBD-P Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 30.376.054.837,- yang terdiri dari 8 Program sebagai berikut :

Tabel 3.13
Program dan Pagu Anggaran 2021

Program		Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	20.897.873.836
2.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp.	511.080.000
3.	Program Pengembangan Ekspor	Rp.	343.380.000
4.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp.	385.330.000
5.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.	93.795.000
6.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp.	7.916.027.001
7.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp.	178.569.000
8.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	50.000.000
TOTAL		Rp.	30.376.054.837

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Berdasarkan 8 program dan pagu diatas, maka diturunkan pagu dan kegiatan untuk 16 Kegiatan, yang dituangkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.14
Program dan Kegiatan Anggaran 2021

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI PAGU	% REALISASI
2	3	4	
BELANJA LANGSUNG	30.376.054.837	25.658.690.334	84,47
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	20.897.873.836	19.374.652.196	92,71
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	267.205.500	267.404.500	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.998.451.602	16.655.841.595	92,54
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.000.000	65.500.000	99,24
Administrasi Umum Perangkat Daerah	568.026.364	561.034.878	98,77
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	292.746.900	277.678.800	94,85
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.226.193.470	1.087.258.758	88,67
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479.050.000	459.933.665	96,01



PROGRAM/KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI PAGU	% REALISASI
2	3	4	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	511.080.000	510.982.000	99,98
Pengendalian Harga Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	511.080.000	510.982.000	99,98
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	343.380.000	340.845.988	99,26
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	343.380.000	340.845.988	99,26
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	385.330.000	384.895.600	99,89
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	74.330.000	74.130.000	99,73
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	240.000.000	239.999.600	100,00
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	71.000.000	70.766.000	99,67
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	93.795.000	93.778.000	99,98
Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	93.795.000	93.778.000	99,98
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	7.916.027.001	4.734.318.852	59,81
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	7.916.027.001	4.734.318.852	59,81
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	178.569.000	174.149.198	97,52
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	178.569.000	174.149.198	97,52
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	50.000.000	45.068.500	90,14
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	50.000.000	45.068.500	90,14

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.



Pada Tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki Realisasi sebesar Rp. 25.658.690.334 atau sebesar 84,47% dengan kegiatan yang memiliki realisasi tertinggi sebesar 100% yaitu kegiatan Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; dan Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di seluruh daerah kab/kota, sedangkan realisasi terendah sebesar 59,85% yaitu pada kegiatan penyusunan, penerapan, dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi. Realisasi pagu 59,85% ini disebabkan karena sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Untuk pengantian lahan kawasan industri Way Pisang tidak dilaksanakan, disebabkan adanya perubahan aturan tentang lahan hutan, dan adanya pelaksanaan dokumen FS kawasan industri Way Pisang. Selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan selalu menunjang sasaran dan tujuan Provinsi Lampung, berikut table tujuan, sasaran dan program/kegiatan pada Tahun 2021 sebelum dan setelah perubahan RPJMD Provinsi Lampung.



Tabel 3.16
Akuntabilitas Keuangan Tahun 2021
Setelah Perubahan RPJMD Provinsi Lampung

INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA INDIKATOR	REALISASI KINERJA INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI PAGU	CAPAIAN REALISASI %
1	2	3	4	5	6	7	8
				BELANJA LANGSUNG	30.376.054.837	25.658.690.334	84,47
Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	5	4,57	91,40	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	7.916.027.001	4.734.318.852	59,81
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	7.916.027.001	4.734.318.852	59,81
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	178.569.000	174.149.198	97,52
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	178.569.000	174.149.198	97,52
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	50.000.000	45.068.500	90,14
				Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	50.000.000	45.068.500	90,14
				TOTAL ANGGARAN PENDUKUNG INDIKATOR SASARAN I	8.144.596.001	4.953.536.550	60,82



INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA INDIKATOR	REALISASI KINERJA INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI PAGU	CAPAIAN REALISASI %
1	2	3	4	5	6	7	8
Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	5,30	8,26	100	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	385.330.000	384.895.600	99,89
				Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	74.330.000	74.130.000	99,73
				Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	240.000.000	239.999.600	100,00
				Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	71.000.000	70.766.000	99,67
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	93.795.000	93.778.000	99,98
				Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	93.795.000	93.778.000	99,98
				PENUNJANG			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	20.897.873.836	19.374.652.196	92,71
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	267.405.500	267.404.500	92,71
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.998.451.602	16.655.841.595	100,00
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.000.000	65.500.000	92,54
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	568.026.364	561.034.878	99,24
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	292.746.900	277.678.800	98,77
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.226.193.470	1.087.258.758	94,85				



INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA INDIKATOR	REALISASI KINERJA INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI PAGU	CAPAIAN REALISASI %
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479.050.000	459.933.665	88,67
				TOTAL ANGGARAN PENDUKUNG INDIKATOR SASARAN II	21.376.998.836	19.853.325.796	92,87
Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	3,33	4,83	100	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	343.380.000	340.845.988	99,26
				Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	343.380.000	340.845.988	99,26
				TOTAL ANGGARAN PENDUKUNG INDIKATOR SASARAN III	343.380.000	340.845.988	99,26
Andil Inflasi Bahan Makanan (%)	≤ 1,5	1,10	100	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	511.080.000	510.982.000	99,98
				Pengendalian Harga Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	511.080.000	510.982.000	99,98
				TOTAL ANGGARAN PENDUKUNG INDIKATOR SASARAN IV	511.080.000	510.982.000	99,98



3.6 Prestasi OPD Yang Diraih Selama Tahun 2021

Prestasi merupakan hasil atas usaha yang dilakukan oleh seseorang. Prestasi dapat dicapai dengan kemampuan intelektual, spiritual dan emosional serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi segala aspek kehidupan. Sedangkan Prestasi Kerja adalah hasil yang diperoleh dari usaha kerja yang dilakukan baik secara perseorangan maupun secara berkelompok (perusahaan/instansi).

Begitu juga dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang terus berusaha untuk berbenah dalam prestasi kerja yang diraih. Pada tahun 2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung telah melaksanakan Expor Coaching Program dengan pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas ekspor sebanyak 30 UKM dan pelaku usaha yang berhasil menjadi eksportir baru sebanyak 14 UKM.

3.7 Inovasi Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mempunyai Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan salah satu kegiatannya yaitu Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Disini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung telah membangun sarana dan prasarana digital bagi IKM dalam memasarkan dan mempromosikan produk melalui **Aplikasi Gallery sIKaM** berbasis website. Gallery sIKaM adalah platform digital berbasis website yang menampilkan produk IKM di Provinsi Lampung yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh siapa pun. Dengan tampilan yang mudah digunakan, Gallery sIKaM memiliki misi untuk memperluas publikasi dan meningkatkan pemasaran Produk IKM, serta sebagai Database jumlah dan jenis Produk IKM di Provinsi Lampung agar dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia secara luas. Aplikasi Gallery sIKaM dapat diakses melalui alamat <https://gallery-ikm.disperindag.lampungprov.go.id>.

3.8 Tindak Lanjut Inspektorat

Evaluasi terhadap pelaporan kinerja tahun 2021 belum dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Lampung, sehingga belum ada yang ditindaklanjuti oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2021 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sebelum Perubahan RPJMD
 - Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 95,85%
 - Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%
 - Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%
 - Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%
2. Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Setelah Perubahan RPJMD
 - Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 91,40%
 - Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%
 - Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%
 - Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, ke 4 sasaran mencapai kriteria penilaian realisasi kinerja **sangat tinggi**.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Lampung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 30.376.054.837 dengan realisasi sebesar Rp. 25.658.690.334 atau sebesar 84,47%,- yang terdiri dari 8 Program dan 16 Kegiatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung masih perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Provinsi Lampung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.